ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN TITI RANTAI KEC.MEDAN BARU KOTA MEDAN

Oleh:

Efrean Manatap Simanullang 1)
Doli Tua Mulia Raja Panjaitan 2)
Priesaweny Riris T. Simamora 3)
Universitas Darma Agung 1,2,3)

E-mail :

Simanullangefranmanatap@gmail.com
dolipanjaitan@gmail.com
Prietsawenny123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kelurahan Titi Rantai dalam penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparatur kelurahan dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kelurahan cukup signifikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta akurasi data penerima bantuan. Faktor utama penyebab kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tingginya jumlah tanggungan keluarga, dan dominasi pekerjaan sektor informal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kelurahan, validasi data yang lebih akurat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kelurahan, Kemiskinan, Program Sosial, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACK

This study aims to analyze the policy of the Titi Rantai Village Government in poverty alleviation and to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of these policies. This research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques through in-depth interviews with village officials and program beneficiaries. The findings show that the village government plays a significant role in implementing social assistance programs such as the Family Hope Program (PKH), Direct Cash Assistance (BLT), and MSME empowerment initiatives. However, the effectiveness of these policies is hindered by limited public participation, inadequate resources, and inaccuracies in beneficiary data. The main causes of poverty in Titi Rantai Village include low levels of education, high family dependency rates, and a predominance of informal sector employment. The study recommends enhancing the capacity of village officials, improving data validation, and actively involving the community in planning and implementing poverty reduction programs.

Keywords*: Government Policy, Village, Poverty, Social Program, Community Participation.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan di suatu negara dan sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan hampir tidak ada satupun negara yang tidak memiliki permasalahan kemiskinan, termasuk di Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang tinggi merupakan penghambat pembangunan, dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan dan memiliki banyak kekurangan. Kemiskinan masih sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, hal ini karena pertumbuhan ekonomi termasuk indikator penting yang digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu perekonomian di suatu negara. Ledakan dari permasalahan kemiskinan akan membahayakan kondisi di suatu negara yang akan menyebabkan suatu krisis sehingga berdampak pada stabilitas politik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa peraturan, program, atau kegiatan yang dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan mencerminkan bentuk intervensi negara melalui program-program lokal, seperti bantuan langsung, pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, dan kolaborasi dengan stakeholder lain. Namun, efektivitas dari kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama dalam hal pelaksanaan, sasaran, serta partisipasi masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan laporan badan pusat statistik Kelurahan Titi Rantai Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa jumlah dan presentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 46.662 ribu jiwa atau 14,61% dan turun menjadi 42.440 ribu jiwa atau 13.17% pada tahun 2016. Memasuki tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 40.889 ribu jiwa atau 12,57% dan naik menjadi 43.059 ribu jiwa atau 12.94% pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 jumlahnya menjadi 40.130 ribu jiwa atau 11.93%.Sumber daya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap wilayah sampai saat ini belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah

yang signifikan untuk mensejahterakan masyarakat di Kelurahan titi rantai. Terbukti dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan, dan membuktikan pula bahwa pemerintah kelurahan titi rantai belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan.

faktor yang menjadi penyebab masih relatif tingginya tingkat kemiskinan yaitu Pendidikan merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, padahal telah diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia seseorang bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan yang semakin rendah menggambarkan kualitas sumber daya manusianya rendah yang dapat menyebabkan penduduk miskin. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kesempatan untuk mendapat kehidupan lebih baik akan semakin besar, karena mempunyai kualitas dalam mencari pekerjaan. Dan Kemiskinan juga erat kaitannya dengan jumlah anggota keluarga karena menggambarkan beban keluarga. Menurut Jinghan (2015), pertambahan penduduk sebagai akibat dari tingginya kelahiran menyebabkan beban hidup keluarga semakin berat. Beban hidup keluarga semakin berat apabila menanggung kerabat misalnya orang tua maupun sanak famili. Sedangkan menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Selain jumlah angoota rumah tangga besar, di dalam rumah tangga miskin ditemukan lebih banyak anggota yang kurang produktif bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak miskin.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 275,77 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan oleh angka kelahiran yang terus meningkat, yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.Kota Medan yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Utara termasuk salah satu kota yang mempunyai persentase penduduk miskin yang relatif besar karena jumlahnya mencapai sekitar 2,54 juta jiwa atau tingkat persentase sekitar 21,78% di tahun 2024.angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan dengan data pada desember 2021. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya.Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Kota Medan sehingga menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan.

Melihat kondisi jumlah penduduk miskin di Kota Medan yang relatif masih besar, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menekan jumlah kemiskinan.Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tanpa mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut, maka kebijakan tersebut kurang efektif dan tepat pada sasarannya.Oleh karena itu, salah satu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui kajian faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi.Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonometrika. Selanjutnya, model tersebut diharapkan mampu mensimulasikan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dan mampu digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada masa mendatang.

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat, dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 adalah 28,01 juta orang (10,86%). Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Kesenjangan distribusi pendapatan juga semakinmelebar, hal ini terlihat dengan meningkatnya gini rasio Indonesia dari 0,35 pada tahun 2009 menjadi 0,40 pada September 2015.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan upaya Pemerintah Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan titi rantai serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan titi rantai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka di lakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Penaggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merusmuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan?
3. Apakah kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas yakni :

1. Untuk mengetah ui peranan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah :

1. **Manfaat Teoritis**
   Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. **Manfaat Praktis**
   Sebagai dasar dalam meningkatkan kebijakan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif. Dengan memahami pentingnya program penanggulangan kemiskinan, sehingga sumber daya digunakan secara efisien serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
3. **Bagi Akademik**
   Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi universitas dalam memperkaya pustaka dan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk pengajaran di bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi dan meningkatkan kualitas riset akademik yang ada di universitas serta mendukung upaya meningkatkan akreditasi universitas yang lebih baik di bidang riset dan pengajaran.

2.METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengkaji kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan dalam menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan.Dalam penelitian kualitatif penulis untuk menganalisis kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Instrumen utama penelitian adalah penulis itu sendiri, yang menggunakan teknik wawancara dalam memastikan keabsahan data. Penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya menggambarkan fenomena secara rinci tetapi juga memberikan wawasan mendalam dalam kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan**.**

Sugiyono (2022 : 201) analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan data non-numerik, seperti teks, gambar, dan observasi. Analisis kualitatif berfokus pada penggalian data makna dan tem yang terkandung dalam data, serta memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti

Karakteristik Analisis Kualitatif:

1. Fokus pada makna dan interprestasiAnalisis kualitatif berfokus pada penggalian makna dan interprestasi data , bukan hanya pada penghitungan atau pengukuran.
2. Data non-numerik Analisis kualitatif menggunakandata non-numerik, seperti teks, gabar dan observasi
3. Penggalian tema dan pola Analisis kualitatif bertujuan untuk menggali tema dan pola yan terkandung dalam data
4. Konteks dan kompleksitas Analisis kualitatif memertimbangkan konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti

Metode Analisis Kualitatif:

1. Analisis isi
   Analisis isi digunakan untuk menganalisis teks dan mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang terkandung di dalamnya
2. Analisis wacana
   Analisis wacana digunakan untu menanalisis bahasa dan wacana yang digunakan dalam teks atau percakapan
3. Analisis tematik
   Analisis tematik digunaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema yang terkandung dalam data

Kelebihan Analisis Kualitatif:

1. Penggalian makna yang mendalam
   Analisis kualitatif dapat menggali makna yang mendalam dan komleks dari data
2. Fleksibilitas
   Analisis kualitatif dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data dan fenomena

Keterbatasan Analisis Kualitatif:

1. Subjektivitas
   Analisis kualitatif dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti
2. Keterbatasan generalisasi
   Hasil analisis kualitatif mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke polulasi yang lebih luas

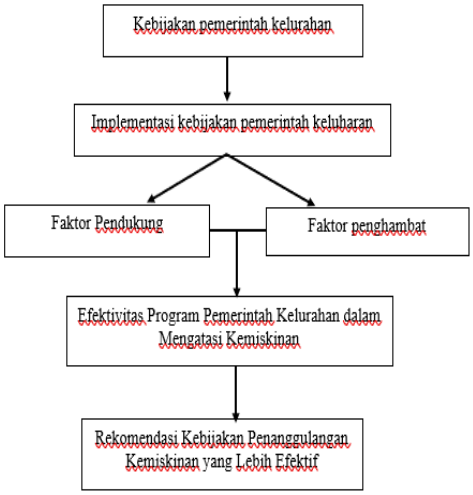
Dengan demikian, analisis kualitatif merupakan metode yang powerful untuk memahami dan menginterprestasikan data non-numerik, namun perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Sumber: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (https://jurnal.ugm.ac.id/jsp)

2 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Berdasarkan analisa, dasar pemikiran kerangka berfikir ini dilihat dari

kebijakan pemerintah kelurahan, faktor pendukung dan penghambat terhadap penanggulangan kemiskinan. Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan momentum dalam perspektif penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh peneliti,2025

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain . Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif menurut Rukminingsih. (2020) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data, bahkan dari sebelum dilaksanakan penelitian yaitu, pada saat pra penelitian penulis sudah mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara beruntun dan sistematis agar mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi tentang menganalisis kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, kemudian mengambil datanya dari lapangan. Jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti hanya satu, sehingga data tersebut harus diseleksi dan diklasifikasi ke dalam kategori-kategori yang berkaitan dengan menganalisis kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan membuang data-data yang tidak perlu bagi peneliti.

3. Penyajian data

Dalam tahap ini penulis mengembangkan sebuah informasi yang telah disusun atau dikumpulkan menjadi bahan yang relevan dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data yang digunakan dalam tahap ini yaitu dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan. Selanjutnya dalam memantapkan analisis data peneliti melakukan koding terlebih dahulu pada setiap hasil penelitian pada masing-masing metode pengumpulan data dalam memudahkan peneliti dalam menggabungkan setiap hasilnya dengan baik.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat proses pembuatan data yang ada.

4.Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan hal ini untuk menggali sumber informasi dalam menjawab hasil penelitian. Dan hal ini ditujukan untuk dapat memproleh data yang dibutuhkan sehingga tercapai penelitian itu sendiri.

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan mei-juli 2025.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Titi Rantai merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif **Kecamatan Medan Baru,** Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam serta menjadi bagian dari kawasan perkotaan yang berkembang. Secara geografis, Kelurahan Titi Rantai memiliki letak yang strategis karena berada di kawasan yang cukup dekat dengan pusat kota Medan dan dikelilingi oleh wilayah kelurahan lainnya dalam lingkup Kecamatan Medan Baru.Secara administratif, Kelurahan Titi Rantai terbagi ke dalam beberapa lingkungan (RT/RW), dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah naungan langsung Camat Medan Baru. Pemerintah Kelurahan bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan, serta menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan program-program pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan.

1. Keadaan Geografi

Kelurahan Titi Rantai merupakan salah satu dari enam kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kelurahan Titi Rantai memiliki letak yang strategis karena berada di kawasan pusat kota yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penting di Kota Medan. Kelurahan ini termasuk ke dalam kawasan perkotaan padat penduduk dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Titi Rantai adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Petisah Hulu (Kec. Medan Baru)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Madras Hulu (Kec. Medan Polonia)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Merdeka (Kec. Medan Baru)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sari Rejo (Kec. Medan Polonia)

Luas wilayah Kelurahan Titi Rantai tidak terlalu besar, namun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Topografi wilayah relatif datar, sesuai dengan karakteristik umum Kota Medan. Hal ini mendukung kegiatan pembangunan, perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik. Keberadaan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Kelurahan Titi Rantai juga cukup memadai, meskipun di beberapa lingkungan masih ditemukan kondisi prasarana yang kurang optimal, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk.

Dari sisi lingkungan hidup, Kelurahan Titi Rantai menghadapi tantangan terkait ketersediaan ruang terbuka hijau dan drainase yang belum merata, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada pada kategori sosial ekonomi rendah.

Secara umum, keadaan geografis Kelurahan Titi Rantai memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah kelurahan dalam menjalankan program-program pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan. Letaknya yang strategis memungkinkan integrasi dengan program pemerintah kota, namun tingkat kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi kebijakan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

2. Keadaan Demografi

Kelurahan Titi Rantai merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dan **pemerintah kelurahan,** jumlah penduduk Kelurahan Titi Rantai mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, urbanisasi, dan mobilitas penduduk.Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kelurahan Titi Rantai tercatat sekitar **9.820 jiwa,** yang terdiri dari **4.780 laki-laki** dan **5.040 perempuan,** yang tersebar di beberapa lingkungan/RT di bawah administrasi kelurahan. Jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak kurang lebih **2.120 KK.** Kepadatan penduduk cukup tinggi mengingat luas wilayah kelurahan yang relatif kecil.Dari segi struktur umur, sebagian besar penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun), yaitu sekitar **65%** dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi dan sosial cukup besar, namun tantangannya adalah bagaimana pemerintah kelurahan dapat memberdayakan kelompok usia produktif tersebut, terutama yang tergolong sebagai penduduk miskin atau pengangguran.

Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Titi Rantai juga cukup beragam. Mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat. Terdapat pula sejumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD, terutama di kalangan usia tua dan keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan, karena tingkat pendidikan sangat berkorelasi dengan peluang kerja dan penghasilan.Dari segi pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, jasa, buruh harian, pengemudi ojek, dan pelaku UMKM. Sebagian kecil bekerja sebagai pegawai swasta dan ASN. Adanya ketimpangan penghasilan di kalangan masyarakat juga memunculkan kelompok rentan miskin, yang rentan terdampak oleh gejolak ekonomi dan krisis sosial.

Struktur rumah tangga di Kelurahan Titi Rantai umumnya terdiri dari anggota keluarga yang cukup banyak. Rata-rata jumlah anggota keluarga mencapai 4–6 orang, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih, terutama dalam rumah tangga miskin. Hal ini menciptakan beban ekonomi yang lebih besar dan berdampak pada kualitas hidup, khususnya dalam hal konsumsi, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga.

Secara keseluruhan, keadaan demografi Kelurahan Titi Rantai menunjukkan bahwa potensi dan tantangan berjalan beriringan. Penduduk yang besar dan didominasi usia produktif adalah kekuatan, namun tanpa pengelolaan dan pemberdayaan yang tepat, justru dapat memperbesar angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman demografi ini sangat penting dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara efektif di tingkat kelurahan.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk

Keterangan	Jumlah
Kepala Keluarga (KK)	**2.120**
Penduduk (jiwa)	9.820
Laki-laki	**4.780**
Perempuan	5.040

Sumber : Kelurahan Titi Rantai diolah data peneliti,2025

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kecamatan Medan Baru merupakan kumpulan masyarakat lintas agama—Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha—yang hidup berdampingan secara harmonis. Tercatat adanya berbagai fasilitas ibadah di setiap kelurahan: masjid, gereja, langgar, hingga kelenteng. Misalnya, Kelurahan Titi Rantai memiliki tiga masjid/musholla, satu langgar, empat gereja, dan total jumlah rumah ibadah mencerminkan kerukunan umat beragama yang kuat. Kecamatan ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki banyak infrastruktur pendidikan. Di Kelurahan Titi Rantai terdapat 4 SD negeri/swasta dan 1 SLTP sebagaimana tergambar pada publikasi tahun 2012–2018.

Selain itu, kelurahan ini menjadi pusat pemukiman bagi mahasiswa karena keberadaan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara dan institusi lainnya di sekitarnya

Berdasarkan data BPS tahun 2018, porsi terbesar penduduk bekerja sebagai wiraswasta hingga 46,97% di seluruh Kecamatan Medan Baru, termasuk di Kelurahan Titi Rantai. Selain itu, sekitar 23,33% bekerja sebagai pegawai swasta, sisanya tersebar di sektor pemerintahan, buruh harian, dan profesi lainnya. Kelurahan Titi Rantai masih mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan tingkat kelurahan, meskipun terdapat layanan posyandu di 10 lingkungan setempat. Pemerintah mengandalkan Puskesmas Padang Bulan yang memberikan layanan imunisasi, penimbangan balita, penyuluhan gizi dan kesehatan ibu dan balita, serta layanan pengobatan ringan dan Jampersal.

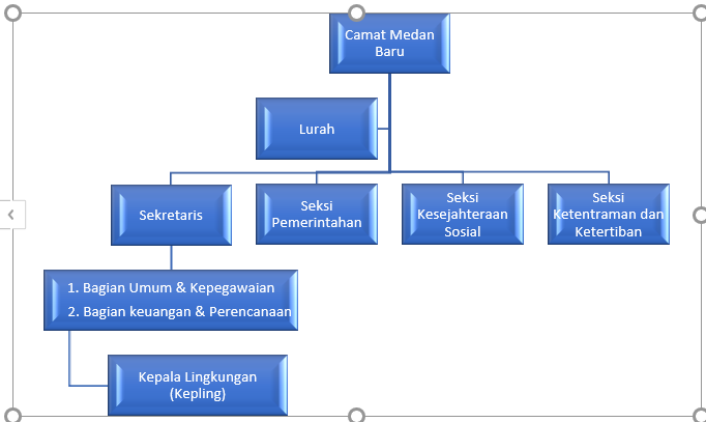
Kawasan Medan lebih luas dikenal oleh warga lokal sebagai kota dengan tingkat kriminalitas yang relatif tinggi, sektor informal yang besar, dan dinamika sosial yang cukup kompleks. Walaupun kecamatan ini tidak secara ekstensif diliput dalam survei khusus tingkat kriminalitas, citra kota Medan secara umum menunjukkan tantangan seperti tingginya angka premanisme dan kriminal jalanan, terutama di kawasan padat urban.

4. Identitas Dan Karakteristik Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai. Informan terdiri dari unsur pemerintah kelurahan dan masyarakat penerima manfaat. Pemilihan informan ini dilakukan agar dapat memberikan data yang kaya, relevan, dan mendalam sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.Berdasarkan sumber data yang dijelaskan pada Bab III, berikut adalah identitas dan karakteristik informan dalam penelitian ini:

5. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Titi Rantai

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan merupakan sistem kerja yang mengatur peran dan tanggung jawab aparat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kelurahan sebagai perangkat wilayah administratif merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kota kepada masyarakat secara langsung.Secara umum, **struktur organisasi Kelurahan Titi Rantai** mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan. Adapun unsur-unsur utama dalam struktur pemerintahan kelurahan adalah sebagai berikut:



5. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Titi Rantai

1. Lurah

Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan.

Tanggung Jawab :

1. Menjalankan kebijakan pemerintah kota di tingkat kelurahan.
2. Memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat.
3. Menyusun perencanaan kegiatan tahunan (seperti Musrenbang).

4. Membina dan mengawasi perangkat kelurahan serta kepala lingkungan.

2. Sekretaris Kelurahan

3. Tugas : Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kelurahan.

Tanggung Jawab :

1. Membantu Lurah dalam penyusunan rencana kerja dan laporan.
2. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan kelurahan.
3. Mengatur tata usaha dan arsip kelurahan.

2. Seksi Pemerintahan
   Tugas : Mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan kependudukan.

Tanggung Jawab :

1. Mengurus data kependudukan, akta kelahiran, KTP, KK, dan surat pindah.
2. Membina RT/RW serta hubungan antarwarga.
3. Membantu penyelesaian konflik administratif di masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
   Tugas : Menangani urusan sosial, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Tanggung Jawab :

1. Melaksanakan program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan sembako.
2. Mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UMKM.
3. Mengkoordinasikan kegiatan kepemudaan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Tugas : Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah kelurahan.

Tanggung jawab :

1. Menyelesaikan permasalahan sosial dan pelanggaran ringan di masyarakat.
2. Bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan peraturan daerah.

6. Kepala Lingkungan (Kepling)

Tugas : Menjadi perpanjangan tangan kelurahan di lingkungan masyarakat (setingkat RT/RW).

Tanggung Jawab :

1. Menyampaikan informasi dari kelurahan kepada warga dan sebaliknya.
2. Mengelola pendataan warga di lingkungannya.
3. Membantu pelaksanaan program sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan.
4. Mengawasi ketertiban, kebersihan, dan gotong royong warga.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data di Lapangan

Dalam penelitian ini menempuh beberapa tahapan penelitian dalam pengumpulan data. Tahapanya adalah sebagai berikut: dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dalam lapangan berdasarkan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Dimana hasil penelitian ini di peroleh melalui wawancara serta observsi dan berbagai responden atau informan.

2.1 Tahapan Awal Penelitian

Penelitian ini diawali dengan meminta surat izin para peneliti dari bagian administrasi FISPRA UDA, yang ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan Titi Rantai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,yaitu surat izin pelaksanaan penelitian mahasiswa dan surat izin dari Badan Riset dan Inovasi Daerah.Setelah itu diberikan izin oleh Pemerintah kelurahan Titi Rantai untuk meneliti di kelurahan tersebut.

2.2 3Pengumpulan data penelitian

Pengumpulan data dimulai dengan wawancara kepada responden,selama sebulan yang dimulai tanggal 20 Juni 2025,dengan sejumlah responden atau informan sebanyak 10 orang. Proses pengumpulan data dengan menggunakan atau melakukan wawancara dengan panduan beberapa pertanyaan wawancara.

3. Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Pemerintah kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, Sekretaris Lurah, serta masyarakat setempat, diketahui bahwa Kelurahan Titi Rantai telah menjalankan berbagai program dan inisiatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan, baik melalui bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi.

Menurut **Suparlan (2015),** kemiskinan tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus melibatkan berbagai aspek dan aktor, termasuk pemerintah daerah hingga ke tingkat kelurahan.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara jelas Bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan ,maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Lurah yaitu Bapak Frank Tony H.Hutagalung,SSTP beliau menjelaskan:

"Pemerintah Kelurahan Titi Rantai memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kecamatan, dinas sosial, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial, memberikan pelatihan keterampilan kerja, serta mendata warga kurang mampu secara berkala. Selain itu, kami juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, seperti UMKM, agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Peran kami tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan penghubung antara warga dengan program-program pemerintah yang ada."(wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Selain itu, pernyataan lurah titi rantai tersebut juga didukung oleh sekretaris yaitu Ibu Sri Kostaria,SH.dimana beliau menjelaskan :

"Sebagai Sekretaris Kelurahan, saya melihat bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial semata, tetapi juga pada pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat. Kami di kelurahan secara rutin melakukan pendataan keluarga miskin melalui musyawarah kelurahan (muskel), agar data yang kami miliki selalu akurat dan valid. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta akses terhadap program-program pemerintah pusat maupun daerah. Kami berusaha memastikan agar warga yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program yang dijalankan." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Dengan adanya penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Titi Rantai tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan penyaluran bantuan sosial, yang menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.untuk mempertegas pernyataan tersebut,peneliti mewawancarai salah satu penduduk atau masyarakat keluraha titi rantai yaitu Bapak Iming beliau menjelaskan :

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program dari kelurahan. Beberapa waktu lalu saya menerima bantuan sembako, dan keluarga saya juga pernah mendapatkan bantuan langsung

tunai. Selain itu, saya pernah ikut pelatihan keterampilan yang diadakan kelurahan bekerja sama dengan pihak luar. Itu sangat membantu saya dalam membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Menurut saya, kelurahan cukup peduli dengan warga yang benar-benar membutuhkan, dan kami merasa didampingi, tidak dibiarkan begitu saja." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Dari hasil pernyataan informan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Titi Rantai memiliki peran yang aktif dan berdaya guna dalam penanggulangan kemiskinan, tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, inisiator, dan pendamping masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup pendataan warga miskin secara berkala, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap UMKM. Keberadaan program-program ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan layak, minimnya lapangan kerja di sektor formal, serta ketergantungan pada sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Selain itu, keterbatasan akses terhadap modal usaha dan minimnya kepemilikan aset produktif membuat warga sulit mengembangkan usaha secara mandiri. Masalah kesehatan, tingginya beban tanggungan keluarga, serta kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi juga turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Tidak kalah penting, sebagian masyarakat masih bergantung pada bantuan sosial tanpa upaya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menjadikan kemiskinan sebagai persoalan yang kompleks dan berlapis.

Untuk melihat hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan dengan secara langsung kepada Lurah yaitu Bapak Frank Tony H.Hutagalung,SSTP beliau menjelaskan :

"Kemiskinan di wilayah kami disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan, di mana sebagian warga tidak menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang yang memadai, sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang stabil. Selain itu, lapangan pekerjaan formal sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang bekerja secara informal seperti buruh harian atau pedagang kaki lima dengan penghasilan tidak tetap. Masalah lainnya adalah keterbatasan modal usaha dan minimnya keterampilan kerja yang membuat warga sulit mengembangkan potensi ekonominya. Tak sedikit pula yang menghadapi masalah kesehatan atau memiliki tanggungan keluarga yang besar, yang menambah beban pengeluaran rumah tangga. Kami di kelurahan berupaya mendata secara akurat dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kondisi ini secara bertahap." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Pernyataan lain juga peneliti tanyakan kepada Kepala Lingkungan (kepling II) yaitu Bapak Darisno Bangun beliau menjelaskan :

"Sebagai kepala lingkungan, saya melihat langsung kondisi masyarakat sehari-hari. Banyak warga kami yang hidup dalam keterbatasan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebagian besar hanya

bekerja sebagai buruh bangunan, tukang becak, pedagang kecil, atau pekerja serabutan. Mereka juga kesulitan mendapatkan akses modal usaha, padahal memiliki kemauan untuk mandiri. Selain itu, beberapa warga masih tinggal di rumah tidak layak huni dan tidak memiliki aset produktif. Kondisi pendidikan juga memprihatinkan, terutama bagi generasi muda yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Hal-hal seperti inilah yang menurut saya menjadi penyebab utama kemiskinan di lingkungan kami." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Pernyataan lain juga peneliti tanyakan kepada sekretaris yaitu Ibu Sri Kostaria,SH beliau menjelaskan :

"Dari pengalaman saya bekerja di kelurahan, banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena kurangnya keterampilan kerja. Mereka tidak memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini, sehingga hanya bisa bekerja di sektor informal dengan penghasilan pas-pasan. Selain itu, ada juga warga yang tidak memahami bagaimana cara mengakses program bantuan pemerintah, baik karena keterbatasan informasi maupun kurangnya literasi digital. Kami sering menerima keluhan dari masyarakat yang merasa belum terjangkau bantuan, padahal data sudah kami laporkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara merata." (wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Dari hasil pernyataan informan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa Dari hasil pernyataan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara struktural maupun sosial ekonomi. Faktor-faktor utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan formal, keterbatasan keterampilan dan modal usaha, serta rendahnya akses terhadap informasi dan program bantuan pemerintah. Selain itu, kondisi kesehatan, beban tanggungan keluarga, dan kurangnya kepemilikan aset produktif juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Hambatan dalam literasi digital serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif bantuan sosial turut menjadi kendala dalam proses penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan di wilayah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif masyarakat.

3. Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Pemerintah Kelurahan Titi Rantai menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendistribusian bantuan sosial secara tepat sasaran. Kebijakan tersebut mencakup pendataan rutin keluarga miskin melalui musyawarah kelurahan (muskel), penyaluran bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT), serta pelaksanaan program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Selain itu, kelurahan juga menjalin kerja sama dengan dinas terkait, lembaga sosial, dan pelaku usaha dalam pemberian modal usaha kecil serta mendampingi masyarakat agar mampu mengakses program-program pemerintah, baik di tingkat kota maupun pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga membangun masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara jelas Apakah kebijakan pemerintah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan ,maka peneliti melakukan wawancara secara langsung

kepada Lurah yaitu Bapak Frank Tony H.Hutagalung,SSTP beliau menjelaskan:

"Pemerintah Kelurahan Titi Rantai memiliki beberapa kebijakan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dimulai dari proses pendataan keluarga miskin secara akurat melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang melibatkan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat. Data ini menjadi dasar dalam menyalurkan bantuan sosial seperti sembako, BLT, maupun program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kami juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan kerja, pelatihan UMKM, dan kerja sama dengan dinas terkait untuk membuka akses terhadap modal usaha. Kami tidak hanya menunggu program dari atas, tapi juga berinisiatif menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Selain itu, pernyataan lurah titi rantai tersebut juga didukung oleh kepala lingkungan (Kepling V) yaitu Ibu Febri Sri Utami .dimana beliau menjelaskan :

"Kami sebagai kepala lingkungan berperan langsung dalam mengidentifikasi dan mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Setiap pengajuan bantuan sosial atau program pemberdayaan selalu diawali dengan pendataan di lingkungan masing-masing. Kami juga mendampingi warga dalam proses pengurusan administrasi agar mereka bisa mengakses bantuan yang disediakan oleh kelurahan maupun dari pemerintah kota. Selain itu, saya juga melihat bahwa pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh kelurahan sangat membantu, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin memiliki penghasilan tambahan dari usaha kecil-kecilan. Dengan adanya kebijakan dan program seperti ini, warga merasa lebih diperhatikan dan terbantu untuk keluar dari kondisi ekonomi yang sulit." (wawancara tanggal 17 Juli 2025)

Pernyataan lain juga peneliti tanyakan kepada Masyarakat yaitu Ibu Risma beliau menjelaskan :

"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program-program dari kelurahan, seperti bantuan sembako dan pelatihan keterampilan. Beberapa waktu lalu saya mengikuti pelatihan membuat kue yang difasilitasi oleh kelurahan, dan sekarang saya sudah mulai menerima pesanan dari tetangga. Meskipun masih kecil-kecilan, tapi ini sangat membantu menambah penghasilan keluarga. Selain itu, saya juga dibantu oleh kepala lingkungan dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan bantuan sosial. Saya bersyukur karena pemerintah kelurahan benar-benar memperhatikan masyarakat kecil seperti kami." (wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kelurahan Titi Rantai dalam penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pendataan warga miskin secara akurat, penyaluran bantuan sosial, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap usaha kecil. Pelibatan perangkat lingkungan dalam proses pendataan dan pendampingan administrasi juga memastikan bahwa program berjalan tepat sasaran. Masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk bantuan ekonomi maupun peningkatan kapasitas diri, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

4. Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan Titi Rantai dalam penanggulangan kemiskinan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Secara umum, masyarakat merespon positif berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan, khususnya karena kebijakan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga yang membutuhkan. Tanggapan masyarakat berikut memberikan gambaran konkret mengenai persepsi dan pengalaman mereka terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah kelurahan:

Menurut Ibu Hana,*"Saya sangat bersyukur atas perhatian kelurahan. Program pelatihan menjahit yang saya ikuti benar-benar bermanfaat. Setelah pelatihan, saya bisa menerima pesanan baju dari tetangga dan hasilnya menambah penghasilan keluarga kami. Tidak hanya itu, kelurahan juga membantu saat kami butuh bantuan administrasi. Menurut saya, kebijakan dari kelurahan sangat tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Saya harap program-program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan."(Wawancara, 17 Juli 2025).*

Menurut Bapak Tony,*"Saya lihat kebijakan yang diterapkan sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kelurahan lebih sering turun ke warga, menyosialisasikan program bantuan dan pelatihan. Saya pernah ikut pelatihan servis motor meskipun belum sepenuhnya saya jalankan. Tapi dengan adanya program itu, kami yang tidak punya keahlian jadi punya harapan untuk usaha. Harapannya, akses terhadap bantuan modal juga lebih diperluas."(Wawancara, 17 Juli 2025).*

Menurut Ibu Margaret*"Saya sangat mendukung kebijakan kelurahan yang tidak hanya memberikan bantuan sembako, tetapi juga pelatihan dan bimbingan usaha. Saya sudah ikut pelatihan membuat kue dan sekarang bisa berjualan dari rumah. Saya dibantu juga untuk memasarkan lewat media sosial. Ini bukan hanya bantuan sesaat, tapi benar-benar membuat saya dan keluarga lebih mandiri. Kebijakan seperti ini sangat membantu, apalagi kalau bisa dijadikan program rutin."(Wawancara, 17 Juli 2025).*

Dari berbagai tanggapan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kelurahan Titi Rantai dalam penanggulangan kemiskinan mendapat apresiasi positif dari warga. Program-program yang bersifat partisipatif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, bantuan sosial, serta pelayanan administrasi, dinilai tepat sasaran. Masyarakat merasa lebih diperhatikan dan difasilitasi untuk keluar dari kondisi ekonomi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya terletak pada konsep dan pelaksanaannya, tetapi juga pada bagaimana masyarakat merasakan dan terlibat langsung dalam proses tersebut.

4. Pembahasan

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan hasil wawancara dengan teori-teori yang relevan mengenai penanggulangan kemiskinan, peran pemerintahan kelurahan, dan kebijakan publik berbasis pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana kebijakan Pemerintah Kelurahan Titi Rantai efektif dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya.

1. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kelurahan Titi Rantai memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan, karena merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk mengelola urusan lokal,

termasuk isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan.

Dari hasil wawancara dengan Lurah Bapak Frank Tony H. Hutagalung, diperoleh gambaran bahwa pemerintah kelurahan aktif dalam mendata masyarakat miskin, menyalurkan bantuan sosial (sembako, BLT, PKH), serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja. Program ini tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan peran kelurahan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat. Sekretaris kelurahan dan kepala lingkungan juga turut mendukung peran ini melalui musyawarah kelurahan (muskel) dan pengawasan lapangan secara langsung.Pendekatan seperti ini sejalan dengan pendapat Suparlan (2015) bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan multisektor dan melibatkan aktor lokal agar lebih efektif. Partisipasi aktif pemerintah kelurahan menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat miskin yang seringkali tidak tersentuh oleh program skala besar pemerintah pusat.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan

Kemiskinan di Kelurahan Titi Rantai tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Hasil wawancara dengan informan, termasuk kepala lingkungan dan staf kelurahan, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan kerja yang minim, keterbatasan modal usaha, serta beban tanggungan keluarga menjadi penyebab utama kemiskinan.Sebagian besar warga bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, tukang becak, dan pekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Sementara itu, kurangnya akses terhadap informasi bantuan dan keterbatasan literasi digital juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan peluang bantuan atau program pemerintah.

Temuan ini menguatkan teori kemiskinan struktural yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil serta akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga harus menyasar akar masalah yang berlapis tersebut, bukan hanya dengan memberikan bantuan tunai tetapi juga melalui intervensi jangka panjang seperti pendidikan dan pemberdayaan.

3. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kelurahan

Kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Titi Rantai terbukti menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta penguatan UMKM merupakan strategi kebijakan yang dikembangkan secara terarah. Proses pendataan yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan juga meningkatkan akurasi data penerima bantuan, sehingga kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.Hasil wawancara dengan warga seperti Ibu Hana, Pak Tony, dan Ibu Margaret menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini. Mereka tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga mengalami peningkatan kemampuan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan.

Pendekatan partisipatif dan berbasis pemberdayaan yang dilakukan oleh kelurahan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari bantuan karitatif menuju pembangunan kapasitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan (empowerment) dalam pembangunan sosial yang menekankan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat miskin agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. **Peran Pemerintah Kelurahan** Titi Rantai dalam penanggulangan kemiskinan cukup strategis, mencakup implementasi berbagai program seperti bantuan sosial (PKH, BLT), pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan pendampingan masyarakat miskin. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi tantangan birokrasi, keterbatasan dana, serta validitas data penerima manfaat.
2. **Faktor Penyebab Kemiskinan** di Kelurahan Titi Rantai mencakup rendahnya tingkat pendidikan, tingginya jumlah tanggungan keluarga, ketergantungan pada sektor informal, serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Faktor struktural dan kultural juga mempengaruhi, di mana kemiskinan menjadi kondisi yang diwariskan dan sulit diputus.
3. **Kebijakan Pemerintah Kelurahan** secara umum telah mencerminkan upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui kolaborasi dengan pemerintah kota, lembaga sosial, dan masyarakat. Namun, belum semua kebijakan menyentuh akar permasalahan secara mendalam. Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

1.2. Saran

1. **Perlu Penguatan Basis Data dan Evaluasi:** Pemerintah Kelurahan perlu membangun database masyarakat miskin yang akurat dan terbarukan, agar penyaluran bantuan dan program tepat sasaran. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga penting agar kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis.
2. **Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan:** Disarankan untuk fokus pada program pemberdayaan ekonomi jangka panjang seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan UMKM, serta pendampingan usaha agar masyarakat miskin tidak sekadar menerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri.
3. **Peningkatan Kualitas SDM Kelurahan:** Aparat kelurahan perlu terus ditingkatkan kompetensinya dalam hal perencanaan kebijakan berbasis data, pendekatan partisipatif, serta manajemen program berbasis hasil (*result-based management).*

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2018). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Candra, Made. 2018. Peran Lurah Dalam Menanggulangi Kemiskinan.*Governance*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1455%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1455/1155.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896

DUMASARI LUBIS. 2021. "Analisis pengentasan kemiskinan di kota medan dumasari lubis."

Fajri, Amelia Kurnia. 2022. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan." *Gema Publica* 7(1): 158–70. doi:10.14710/gp.7.1.2022.158-170.

Fajry Febriyanty.2018."Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros"

Gunawan, S. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *PedomanPelaksana Lembaga KeuanganMikro, Kelompok UsahaBersama*. Jakarta: Kemensos

Lidya, Britania, Putong, Kalvin, Edo, Wahyudi. "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM". Jurnal Kebijakan Publik. 13(4) : 2022

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited

Noor, A. (2007). *Ilmu Sosial Dasar* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Prabawa. (1991). *Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Indhillco.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Jurna Borneo Administrator Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019 : 1-18

Sartika, C, Yani, M.B, Aya W.R. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Jurnal Ekonomi (JE) Volume 1 Nomor 1 , April 2016.

Sadewo, L. d. (2017). *Masalah Masalah Kemiskinan.* Surabaya: Unesha Universiti

Sunggono, B. (1994). *"Hukum dan Kebijaksanaan Publik"*. Sinar Grafika, Jakarta

Soegijoko, (2001). *Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Soegikoko: Bandung. Utama,

Wahyuningsih, Elok. Rochim, Ibnu A. Widiyanto, Kendry M. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya". Jurnal Penelitian Administrasi Publik. 4(3) (2023): 234

Widjajanti, Keshi. "Model Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal Ekonomi Pembangunan. 1(12) (2011): 15-27

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.

Yasa, Dana G I, Sandiasa Gede. "Implementasi Kebijakan Desa Pakraman dalam Pemberdayaan Masyarakat". Locus Majalah Ilmiah FISIP. 1(9) (2018)

Yogia, Adidi M. Suri, Meirina D. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan". Sosio Konsepsia. 3(9) (2020).